

PEMERINTAH DAERAH

2004

UU NO. 32, LN 2004/NO. 125, TLN NO. 4437, LL.SETNEG : 115 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Karena UU No. 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diganti dengan menetapkan UU tentang Pemerintahan Daerah.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, Pasal 34; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004.

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pengertian mengenai Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan perwakilan rakyat daerah, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas pembantuan, Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Desa, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, APBD, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan, Pinjaman Daerah, Kawasan Khusus, Pembentukan daerah dan Kawasan Khusus; Pembagian Urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan Pemerintahan; Kepegawaian Daerah; Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Perencanaan Pembangunan daerah; Keuangan Daerah; APBD; Kerja sama dan Penyelesaian Perselisihan; Kawasan Perkotaan; Desa; Pembinaan dan Pengawasan;.

CATATAN : - UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Oktober 2004.

- UU ini mencabut UU No. 22 Tahun 1999

- Penjelasan : 62 hlm.